LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 000.7.2.4/ Kep.393-Bapperida/ VIII/ 2026
TANGGAL 26 Agustus 2026
TENTANG RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI
TAHUN 2026



PEMERINTAH KOTA BEKASI
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas izin-Nya penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2026 dapat diselesaikan penyusunannya. Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025-2029, yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Penyusunan Rencana Kerja ini menjadi faktor mendasar dalam mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, Rencana Kerja Perubahan 2026 harus mencerminkan kebijakan yang lebih responsif dan adaptif. Semua kebijakan, program, sasaran, dan kegiatan yang dilaksanakan harus sejalan dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT), sekaligus mengedepankan partisipasi masyarakat dan keterlibatan pemangku kepentingan. Dengan pendekatan ini, diharapkan Rencana Kerja tidak hanya memenuhi target pembangunan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat kohesi sosial di Kota Bekasi.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan dan untuk dijadikan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di sisa Tahun 2026, dimana target dan indikator sasaran yang telah disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi dan menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja yang harus dicapai di akhir tahun 2026. Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman semua aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah disepakati bersama.

Kami menyadari, tiada suatu karya manusia yang sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran, pendapat, dan kritik demi penyempurnaan Renja untuk masa yang akan datang. Akhirnya, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyempurnaan Renja Perubahan ini.

Bekasi, 26 Agustus 2026

Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Bekasi

Drs. Hudi Wijayanto, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19690121 199007 1 001

DAFTAR ISI

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 LANDASAN HUKUM 4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 7
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 8

BAB II 10

EVALUASI RENJA BADAN KESBANGPOL KOTA BEKASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 10

2.1 Evaluasi RENJA Badan Kesbangpol Kota Bekasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bakesbangpol Kota Bekasi Sampai Dengan Triwulan II 23
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol Kota Bekasi 23
2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD 28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 39

BAB III 40

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESBANGPOL KOTA BEKASI 40

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 40
3.2 Tujuan dan Sasaran Badan Kesbangpol Kota Bekasi 41
3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kesbangpol Kota Bekasi Pada Perubahan Anggara TA. 2026 43

BAB IV 53

PENUTUP 53

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 sampai dengan Triwulan II Hasil Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2025.....11

Tabel 2. 2 Capaian Kinerja Indikator Sasaran Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2025 23

Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2025.....30

Tabel 3. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2025 41

Tabel 3. 2 Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi menurut Esselonoring (Data juni 2025) 42

Tabel 3. 3 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Keterkaitan Renja PD dengan RKPD 3

Gambar 1. 2 Keterkaitan Renja PD dengan Renja PD Prov 3

Gambar 3. 1 Struktur Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi (Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 129 Tahun 2021).....42

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengedalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Dan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunanm Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 merupakan dokumen Perencanaan Kinerja untuk tahun pertama periode Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2025-2029 yang menjadi pedoman penyusunan Renja dan Anggaran perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Renstra dan Rencana Pembangunan Daerah diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan Renja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Bekasi tahun 2025, Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Periode 2025-2029, Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota. Renja harus selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut, utamanya yang berkaitan langsung dengan urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara Perencanaan Strategis Jangka Menengah dengan Perencanaan dan Penganggaran Tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja PD berfungsi menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Operasional yang memuat arah Kebijakan Pembangunan, Prioritas Pembangunan, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Program Kegiatan PD.

Dalam rangka melaksanakan efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 serta mewujudkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah *(RPJMD)* Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang diimplementasinya oleh Bakesbangpol Kota Bekasi. Usulan program dan kegiatan perubahan Tahun 2026 Badan Kesbangpol tersebut kemudian disatukan dengan usulan program dan kegiatan dari Perangkat Daerah lain dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi untuk dibahas ke dalam Pra Musrembang Kota Bekasi. Dalam forum ini terjadi proses telaah analitik mengenai daftar program dan kegiatan RKPD untuk disempurnakan.

RKPD yang telah disempurnakan tersebut kemudian dibawa ke dalam forum Musrenbang tingkat Kota Bekasi untuk disahkan dalam bentuk penandatanganan berita acara Musrenbang. Hasil dari Musrenbang tingkat Kota ini merupakan finalisasi program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah. Proses Penyusunan Renja perubahan dilakukan dalam rangkaian Penyusunan RKPD sebagaimana berikut digambarkan keterkaitan serta tahapan Penyusunan Renja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Gambar 1. 1 Keterkaitan Renja PD dengan RKPD

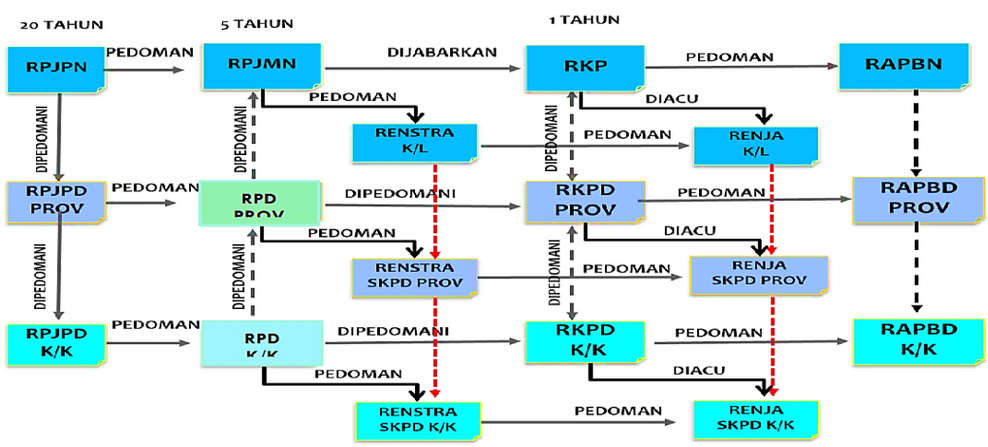
Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renja dengan RKPD
(Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan gambar di atas, Penyusunan Renja dilakukan melalui Tahapan Persiapan, Penyusunan Rancangan Awal Renja, Penyusunan Rancangan Renja, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Renja, hingga Penetapan Renja perubahan. Dalam pelaksanaan Tahun berjalan Renja Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2026 perlu dilakukan perubahan karena adanya perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2026. Selanjutnya perubahan Renja Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2026 menjadi Pedoman dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran *(RKA)* Tahun 2026 Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

Gambar 1. 2 Keterkaitan Renja PD dengan Renja PD Prov



Langkah yang dapat dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kota Bekasi terkait peningkatan kapasitas deteksi dini di wilayah Kota Bekasi adalah dengan melakukan kolaborasi kinerja fisik dengan Provinsi Jawa Barat. Kolaborasi kegiatan dapat dilakukan dengan pembagian data pemantauan situasi kondisi daerah (SIKONDA) dan pemetaan wilayah rawan konflik.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunannya, Renja Badan Kesbangpol Tahun 2025 didasarkan kepada :

- Landasan Ideologi Pancasila;
- Landasan Konstituisonal Undang-Undang Dasar 1945;

Landasan operasional, terdiri dari :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara No. 6323);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembar Negara No. 6402) status mengubah Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 -2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 10);

26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi (Lembaran Daerah Nomor 129 Tahun 2021 Seri D);
27. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
28. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 000.7.2.4/Kep.393-Bapperida/VII/2026 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2026;
29. Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor : 060/752/SETDA.Org tanggal 06 Februari 2023 tentang Pelaksanaan Mekanisme Kerja Pasca Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud dari penyusunan Renja Perubahan adalah untuk memberikan panduan dan arah bagi aparatur Badan Kesbangpol dalam melaksanakan program dan kegiatan di lingkungan Badan dalam melaksanakan anggaran perubahan. Renja Perubahan Badan Kesbangpol ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (*check and balances*) kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh aparatur Badan Kesbangpol. Renja Perubahan ini juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan yang dijalankan Badan Kesbangpol sejalan dan searah dengan Rencana Pembangunan Daerah atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Bekasi.
b. Tujuan penyusunan Renja Perubahan Tahun 2026:

   Adapun tujuan dari Renja Perubahan Badan Kesbangpol, adalah:

   1. Merumuskan arah pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesbangpol dalam jangka perubahan tahun anggaran 2026 agar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan efektif dan efesien;
   2. Meletakan fondasi dan fokus tujuan pelaksanaan kegiatan yang hendak dicapai dalam tahun 2026;
   3. Menetapkan pedoman (input, output dan outcome) dalam melaksanakan kegiatan tahunan Badan Kesbangpol;

4. Memudahkan di dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun external organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir dari organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perubahan Badan Kesbangpol Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN.**

   Pada Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan perubahan RENJA Badan Kesbangpol Kota Bekasi agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

   1.1. Latar Belakang

   Mengemukakan pengertian ringkas tentang RENJA Badan Kesbangpol Kota Bekasi, proses penyusunan RENJA, keterkaitan antara RENJA dengan dokumen RKPD, RENSTRA, dengan RENJA K/L dan RENJA Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

   1.2. Landasan Hukum

   Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

   1.3. Maksud dan Tujuan

   Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan perubahan RENJA Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2026.

   1.4. Sistematika Penulisan

   Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENJA Badan Kesbangpol Kota Bekasi, serta susunan garis besar isi dokumen.

2. **BAB II EVALUASI RENJA BADAN KESBANGPOL KOTA BEKASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026.**

   Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program serta kegiatan masyarakat;

3. **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESBANGPOL KOTA BEKASI.**

   Pada bagian ini berisikan tabel perubahan rencana program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2026.

4. **BAB IV PENUTUP**

   Pada bagian ini diuraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA BADAN KESBANGPOL KOTA BEKASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi RENJA Badan Kesbangpol Kota Bekasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Kegiatan *Review* hasil pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Kota Bekasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Kota Bekasi dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kota Bekasi selama tahun berkenaan yaitu sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2026 melaksanakan 6 *(Enam)* program, yang terdiri dari 12 *(Dua belas)* kegiatan dan 28 *(Dua puluh delapan)* sub kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp.34.252.144.200,- *(Tiga Puluh Empat Miliar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah)*.

Hasil evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesbangpol Kota Bekasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 secara rinci ditunjukan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 1 Realisasi Sampai dengan Triwulan II Hasil Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2026

Kode Rek	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Outcome / Output		APBD	TW I		TW II		Keterangan
			Target	%		Fisik	Anggaran (%)	Fisik	Anggaran (%)	
8.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Target**	**100%**	**13.213.744.000**	**20%**	**19,67%**	**50%**	**43,88%**	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Target	100 %	75.000.000	25%	25%	50%	50%	
			Realisasi	50%		15%	0%	50%	19,20%	
8.01.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Target	1 Dokumen	50.000.000	15%	100%	50%	50%	**Capaian:** Pelaksanakan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target **Rencana Tindak Lanjut**: Melaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan
			Realisasi	0 Dokumen		15%	0%	50%	24,18%	
8.01.01.2.01 .0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Target	1 Laporan	25.000.000	25%	25%	50%	50%	**Capaian:** Pelaksanakan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target **Rencana Tindak Lanjut:** Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan
			Realisasi	0 Laporan		15%	0%	50%	9,23%	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keuangan Perangkat Daerah	Target	100 %	10.986.755.000	25%	25%	50%	50%	
			Realisasi	50%		25%	21,72%	50%	49,01%	

Kode Rek	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Outcome / Output		APBD	TW I		TW II		Keterangan
			Target	%		Fisik	Anggaran (%)	Fisik	Anggaran (%)	
8.01.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Target	1.316 Orang/bulan	10.971.755.000	325 Orang	25%	230 Orang	53%	**Capaian:** Pelaksanakan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target **Rencana Tindak Lanjut**: Melaksanakan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan
			Realisasi	555 Orang/bulan		325 Orang	22,53%	230 Orang	49,04%	
8.01.01.2.02 .0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Target	16 Laporan	15.000.000	3 Laporan	25%	8 Laporan	50%	**Capaian:** Pelaksanakan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target **Rencana Tindak Lanjut:** Melaksanakan koordinasi lapora keuangan sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan
			Realisasi	8 Laporan		3 Laporan	0%	8 Laporan	25,43%	
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Target	100 %	20.000.000	25%	25%	50%	50%	
			Realisasi	0%		0%	0%	0%	0%	
8.01.01.2.05 .0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Target	10 Orang	20.000.000	0 Orang	0%	5 Orang	50%	**Capaian:** Pelaksanakan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target **Rencana Tindak Lanjut:** Melaksanakan Pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan
			Realisasi	0 Orang		0 Orang	0%	0 Orang	0%	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Target	100 %	835.000.000	25%	25%	50%	50%	
			Realisasi	48,61%		26,39%	0%	48,61%	6,44%	
8.01.01.2.06 .0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Target	3 Paket	350.000.000	1 Paket	25%	2 Paket	50%	**Capaian:** Pelaksanakan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target

Kode Rek	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Outcome / Output		APBD	TW I		TW II		Keterangan
			Target	%		Fisik	Anggaran (%)	Fisik	Anggaran (%)	
			Realisasi	2 Paket		1 Paket	0%	2 Paket	1,81%	**Rencana Tindak Lanjut:** Melaksanakan penyediaan bahan logistik kantor sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan
8.01.01.2.06 .0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Target	12 Paket	60.000.000	3 Paket	25%	6 Peket	50%	**Capaian:** Pelaksanakan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target **Rencana Tindak Lanjut:** Melaksanakan penyediaan barang cetakan dan penggandaan sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan
			Realisasi	6 Paket		0 Paket	0%	3 Paket	21,56%	
8.01.01.2.06 .0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Target	12 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	25%	6 Dokumen	50%	**Capaian:** Pelaksanakan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target **Rencana Tindak Lanjut:** Melaksanakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan
			Realisasi	6 Dokumen		3 Dokumen	0%	6 Dokumen	24%	
8.01.01.2.06 .0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Target	12 Laporan	75.000.000	3 Laporan	25%	6 Laporan	50%	**Capaian:** Pelaksanakan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target **Rencana Tindak Lanjut:** Melaksanakan Fasilitasi Kunjungan Tamu sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan
			Realisasi	6 Laporan		3 Laporan	0%	6 Laporan	0%	

Kode Rek	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Outcome / Output		APBD	TW I		TW II		Keterangan
			Target	%		Fisik	Anggaran (%)	Fisik	Anggaran (%)	
8.01.01.2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Target	12 Laporan	250.000.000	3 Laporan	25%	6 Laporan	50%	**Capaian:** Pelaksanakan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target **Rencana Tindak Lanjut:** Melaksanakan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan
			Realisasi	6 Laporan		3 Laporan	0%	6 Laporan	0%	
8.01.01.2.06 .0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Target	12 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	25%	6 Dokumen	50%	**Capaian:** Pelaksanakan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target **Rencana Tindak Lanjut:** Melaksanakan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan
			Realisasi	6 Dokumen		3 Dokumen	0%	6 Dokumen	0%	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Target	100 %	100.000.000	0%	0%	0%	0%	
			Realisasi	0%		0%	0%	0%	0%	
8.01.01.2.07 .0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Target	11 Unit	300.000.000	0 Unit	0%	0 Unit	0%	**Capaian:** Pelaksanakan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target **Rencana Tindak Lanjut:** Melaksanakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan
			Realisasi	0 Unit		0 Unit	0%	0 Unit	0%	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Target	100 %	585.000.000	25%	25%	50%	50%	
			Realisasi	15%		5%	0%	15%	13,31%	

Kode Rek	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Outcome / Output		APBD	TW I		TW II		Keterangan
			Target	%		Fisik	Anggaran (%)	Fisik	Anggaran (%)	
8.01.01.2.09 .0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Target	22 Unit	350.000.000	6 Unit	25%	12 Unit	50%	**Capaian:** Pelaksanakan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target **Rencana Tindak Lanjut:** Melaksanakan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan
			Realisasi	3 Unit		0 Unit	0%	3 Unit	12,85%	
8.01.01.2.09 .0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Target	25 Unit	100.000.000	6 Unit	25%	7 Unit	50%	**Capaian:** Pelaksanakan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target **Rencana Tindak Lanjut:** Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan
			Realisasi	3 Unit		0 Unit	0%	3 Unit	0%	
8.01.01.2.09 .0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	Target	1 Unit	160.000.000	1 Unit	25%	1 Unit	50%	**Capaian:** Pelaksanakan Kegiatan sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan gedung **Rencana Tindak Lanjut:** Melaksanakan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan
			Realisasi	1 Unit		1 Unit	4,75%	1 Unit	20,57%	

Kode Rek	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Outcome / Output		APBD	TW I		TW II		Keterangan
			Target	%		Fisik	Anggaran (%)	Fisik	Anggaran (%)	
8.01.02	**Program Perguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Target**	**100 %**	**1.385.499.300**	**25%**	**25%**	**50%**	**50%**	
			Realisasi	**50%**		**0%**	**0%**	**50%**	**3,77%**	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah sub kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Target	3 Sub Kegiatan	1.385.499.300	0 Sub Kegiatan	25%	1 Sub Kegiatan	50%	
			Realisasi	1 Sub Kegiatan		0 Sub Kegiatan	0 %	1 Sub Kegiatan	50%	
8.01.02.2.01 .0003	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Target	200 Orang	50.000.000	0 Orang	0%	100 Orang	50%	**Capaian:** Pelaksanakan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target **Rencana Tindak Lanjut:** Melaksanakan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan
			Realisasi	100 Orang		0%	0%	100 Orang	5%	
8.01.02.2.01 .0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Target	2 Dokumen	181.762.000	0 dokumen	0%	0 dokumen	0%	**Capaian:** Pelaksanakan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target **Rencana Tindak Lanjut:** Melaksanakan Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan
			Realisasi	0 Dokumen		0 dokumen	0%	0 dokumen	0%	

Kode Rek	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Outcome / Output		APBD	TW I		TW II		Keterangan
			Target	%		Fisik	Anggaran (%)	Fisik	Anggaran (%)	
8.01.02.2.01 .0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Target	52 Orang	1.153.737.300	0 Orang	0%	52 Orang	50%	**Capaian:** Pelaksanakan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target **Rencana Tindak Lanjut:** Melaksanakan Pembentukan Paskibraka sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan
			Realisasi	52 Orang		0%	0%	52 Orang	4,52%	
8.01.05	**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan**	**Target**	**100 %**	**219.889.900**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	
			Realisasi	**0%**		**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Target	1Sub Kegiatan	219.889.900	0%	0%	0%	0%	
			Realisasi	0 Sub Kegiatan		0%	0%	0%	0%	
8.01.05.2.01 .0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Target	200 Orang	219.889.900	0%	0%	0%	0%	**Capaian:** Pelaksanakan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target **Rencana Tindak Lanjut:** Melaksanakan sub kegiatan di triwulan III
			Realisasi	0 Orang		0%	0%	0%	0%	

Kode Rek	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Outcome / Output		APBD	TW I		TW II		Keterangan
			Target	%		Fisik	Anggaran (%)	Fisik	Anggaran (%)	
8.01.06	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase konflik sosial yang diselesaikan**	**Target**	**100 %**	**2.408.056.000**	**25%**	**25%**	**50%**	**50%**	
			Realisasi	**50%**		**25%**	**11.78%**	**50%**	**18,47%**	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah sub kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Target	3 Sub Kegiatan	2.408.056.000	2 Sub Kegiatan	25%	2 Sub Kegiatan	50%	
			Realisasi	2 Sub Kegiatan		2 Sub Kegiatan	11,78%	2 Sub Kegiatan	18,47%	
8.01.06.2.01 .0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Target	2.968 Orang	250.000.000	600 Orang	25%	1.200 Orang	50%	**Capaian:** Pelaksanakan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target **Rencana Tindak Lanjut:** Melakukan penyerapan anggaran pada sub kegiatan ini.
			Realisasi	1.200 Orang		600 Orang	0%	1.200 Orang	0%	
8.01.06.2.01 .0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Target	12 Laporan	537.200.000	3 Laporan	25%	6 Laporan	50%	**Capaian:** Pelaksanakan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target **Rencana Tindak Lanjut:** Memaksimalkan penyerapan anggaran pada sub kegiatan ini
			Realisasi	6 Laporan		3 Laporan	15,60%	50%	23,05%	

Kode Rek	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Outcome / Output		APBD	TW I		TW II		Keterangan
			Target	%		Fisik	Anggaran (%)	Fisik	Anggaran (%)	
	Penanganan Konflik di Daerah									
8.01.06.2.01 .0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Target	12 Dokumen	1.620.856.000	3 Dokumen	25%	6 Dokumen	50%	**Capaian:** Pelaksanakan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target **Rencana Tindak Lanjut:** Melaksanakan fasilitasi Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan
			Realisasi	6 Dokumen		3 Dokumen	12,34%	6 Dokumen	19,80%	
8.01.03	**Program Peningkatan Peran Partai Politik dab Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**	**Persentase pendidikan politik pada kader partai politik**	**Target**	**100 %**	**10.257.484.000**	**0%**	**0%**	**50%**	**50%**	
			Realisasi	**0%**		**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Target	2 Sub Kegiatan	10.257.484.000	0%	0%	50%	50%	
			Realisasi	0 Sub Kegiatan		0%	0%	0%	0%	

Kode Rek	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Outcome / Output		APBD	TW I		TW II		Keterangan
			Target	%		Fisik	Anggaran (%)	Fisik	Anggaran (%)	
8.01.03.2.01 .0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Target	11 Dokumen	9.937.880.000	0 Dokumen	0%	11 Dokumen	100%	**Capaian:** Sub Kegiatan ini belum mencapai target yang telah ditetapkan **Rencana Tindak Lanjut:** Menyelesaikan verifikasi administrasi untuk bantuan keuangan Parpol
			Realisasi	0 Dokumen		0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%	
8.01.03.2.01 .0004	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Target	1.250 Orang	319.604.000	0 Orang	0%	0 Orang	9%	**Capaian:** Pelaksanakan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target **Rencana Tindak Lanjut:** Melaksanakan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik akan dilaksanakan pada TW III
			Realisasi	0 Orang		0 Orang	0%	0 Orang	0%	

Kode Rek	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Outcome / Output		APBD	TW I		TW II		Keterangan
			Target	%		Fisik	Anggaran (%)	Fisik	Anggaran (%)	
8.01.04	**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentasi Organisasi Kemasyarakatan yang aktif**	**Target**	**72 %**	**5.431.824.987**	**0%**	**0%**	**50%**	**50%**	
			Realisasi	**45%**		**0%**	**0%**	**75%**	**41,38%**	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Target	1 Sub Kegiatan	5.431.824.987	0 Sub Kegiatan	0%	1 Sub Kegiatan	50%	
			Realisasi	0 Sub Kegiatan		0 Sub Kegiatan	0%	0 Sub Kegiatan	41,38%	
8.01.04.2.01 .0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Target	5 Dokumen	5.431.824.987	0 Dokumen	0%	3 Dokumen	50%	**Capaian:** Pelaksanakan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target **Rencana Tindak Lanjut:** MelaksanakanPenyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan
			Realisasi	3 Dokumen		0%	0%	3 Dokumen	41,38%	
TOTAL			**Target**			**17.000.000.000**	**52,30%**	**60%**		
			Realisasi			**8.510.508.294**	**26,34%**	**38,04%**		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bakesbangpol Kota Bekasi Sampai Dengan Triwulan II

Untuk Tahun 2026, capaian kinerja IKU Badan Kesbangpol Kota Bekasi sampai dengan Triwulan II secara rinci ditunjukan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 2 Capaian Kinerja Indikator Sasaran Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Target Tahun 2026	Target Triwulan II Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2026	Tingkat Capaian (Realisasi Terhadap Target 2026)
1.	Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM di Kota Bekasi	Inklusi Sosial	7,65	-	-	- Capaian target baru dapat diukur pada triwulan IV
2.	Meningkatnya kewaspadaan dan kesadaran masyarakat dalam mendukung kehidupan harmoni di daerah	Persentase Konflik Sosial Daerah yang Diselesaikan	100%	-	-	- Capaian target baru dapat diukur pada triwulan IV

Capaian Kinerja yang Badan Kesbangpol Kota Bekasi selama Triwulan II (bulan Januari sampai dengan Juni) belum dapat dilakukan pengukuran. Capaian kinerja IKU bersifat kumulatif. Oleh karena itu, pengukuran baru dapat dilakukan pada triwulan IV.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol Kota Bekasi

Sebagai kawasan perkotaan dengan heterogenitas, mobilitas masyarakat, dan dinamika sosial, ekonomi dan politik yang tinggi, permasalahan kota metropolitan yang terjadi Indonesia ini berlaku pula di Kota Bekasi. Permasalahan itu meliputi aspek ideologi, politik, sosial, budaya dan ekonomi, serta keamanan dan ketertiban.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi bangsa dan negara diwaktu-waktu mendatang adalah bagaimana mempertahankan persatuan dan kesatuan serta mampu mewujudkan sistem dan budaya politik yang demokratis baik

nasional maupun di daerah. Terkait urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, tantangan ini juga menjadi dasar dan kerangka penentuan arah pembangunan politik dalam negeri ke depannya yakni penguatan persatuan dan kesatuan serta pembangunan sistem politik demokrasi.

- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelengagrakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :
  1) Belum optimalnya pendayagunaan SDM aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;
  2) Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi dan database Partai Politik, Ormas/LSM, OKP;
  3) Masih diperlukan peningkatan dukungan anggaran untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat serta meningkatkan wawasan kebangsaan dalam rangka penciptaan kesadaran berbangsa dan bernegara;
  4) Terbatasnya dukungan anggaran operasional Pemerintah Daerah.
- Tantangan yang dihadapi dalam menyelengagrakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :
  1) Letak geografis Kota Bekasi yang menjadi jalur utama lalu lintas dan mobilitas manusia antara kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dan DKI Jakarta dan daerah lainnya telah menjadikan Kota Bekasi sebagai daearah transit dan tujuan utama berbagai aksi kejahatan transnasional dalam bentuk seperti penyelundupan narkotika, human trafficking, pencurian dan aksi terorisme;
  2) Potensi konflik sosial yang masih tinggi antar Ormas/LSM dan OKP dalam memperebutkan lahan/daerah yang diakibatkan masih tingginya tingkat pengangguran;
  3) Kesenjangan sosial antara pendatang yang makmur dan pandai (*welleducated*) dengan penduduk pribumi yang masih berpendidikan dan berpenghasilan rendah;
  4) Tingkat urbanisasi yang tinggi ke wilayah Kota Bekasi dari berbagai daerah dapat menimbulkan kelangkaan lapangan pekerjaan sehingga rentan terjadinya konflik sosial.
- Peluang dalam menyelengarakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :
  1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan basis teknologi informatika;

2) Memperluas jejaring informasi pencegahan dini dengan melibatkan peranserta seluruh elemen masyarakat dalam forum-forum kemasyarakatan yang dapat ditangani oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang dibentuk mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan hingga sampai ke pranata lembaga pemerintahan yang paling dekat dapat dijangkau oleh masyarakat Kota Bekasi;
3) Menguatkan peran kelembagaan sosial kemasyarakatan melalui program pengembangan kerjasama Pemerintah Daerah dengan unsur masyarakat yang diwakili misalnya oleh Ormas dan lembaga nirlaba lainnya dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
4) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, misalnya pihak Sekolah SMA/SMK sederajat dan Universitas, dalam melakukan upaya pengembangan program dan pemahaman pentingnya fungsi dan tugas bidang kesatuan bangsa yang diemban oleh Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.

- Rekomendasi dan Catatan Strategis

  Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terutama evaluasi kinerja dan tantangan serta peluang yang telah diurai dimuka maka rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam bentuk program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

  1) Program dan kegiatan pendukung pelayanan administrasi perkantoran hendaknya ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya karena beberapa item kegiatan dan penganggaran merupakan dukungan secara langsung pada program dan kegiatan teknis.
  2) Penentuan sub kegiatan pada kegiatan teknis harus memperhatikan sebaran sasaran baik itu secara kualitas maupun kuantitas.
  3) Memungkinkan adanya sub kegiatan baru dalam mengoptimalkan ketercapainya tujuan dan sasaran OPD untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Pemerintah Kota Bekasi disandingkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Keberhasilan penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat melalui sinergi perencanaan Kesatuan Bangsa dan Politik di tingkat

nasional dengan perencanaan yang berada di level daerah. Untuk mendukung hal tersebut, Badan Kesbangpol Kota Bekasi telah melakukan penyesuaian pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah. Seluruh dasar hukum pelayanan Badan Kesbangpol Kota Bekasi mengacu/mengadopsi dasar hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Saat ini, produk layanan yang diberikan Badan Kesbangpol Kota Bekasi kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1) Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)/Surat Tanda Lapor Keberadaan kepada Oganisasi Kemasyarakatan (Orkemas) yang berdomisili di Kota Bekasi. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) merupakan produk hukum Badan Kesbangpol Kota Bekasi yang merupakan implementasi dari UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas. Penerbitan SKT ini berada di bawah tanggung jawab Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
2) Penerbitan Surat Pertimbangan Pendirian Rumah Ibadah kepada Panitia Pendirian Rumah Ibadah. Surat pertimbangan ini merupakan produk hukum yang didasari oleh Peraturan Bersaman Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian RUmah Ibadat. Penerbitan Surat Pertimbangan Pendirian Rumah Ibadah ini berada di bawah tanggung jawab Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
3) Penerbitan Surat Keterangan Tanda Lapor Orang Asing. Penerbitan Surat Keterangan Tanda Lapor Orang asing ini berada di bawah tanggung jawab Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen pada bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
4) Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penelitian. Surat Rekomendasi Izin Penelitian ini berada di bawah tanggung jawab Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi pada Bidang Politik Dalam Negeri;
5) Fasilitasi kegiatan kerukunan umat beragama melalui kegiatan roadshow, seminar, sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD), pelayanan tersebut menjadi tanggung jawab Sub Bidang Ketahanan

Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;

6) Pembinaan Pendidikan Politik untuk masyarakat pemula dan partai politik. Kegiatan ini merupakan tupoksi pada Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi pada Bidang Politik Dalam Negeri;
7) Pembinaan bela negara, Penguatan ideologi pancasila melalui tema kebangsaan, Pendidikan Wawasan Kebangsaan untuk masyarakat pemula, tokoh masyarakat, tokoh agama, partai politik dan anggota Orkemas. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan karakter Bangsa;
8) Pembinaan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), Badan Kesbangpol memfasilitasi kegiatan tersebut sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengbar Bendera Pusaka. Kegitan ini merupakan sebagai sarana untuk mencetak calon-calon pemimpin berkarakter Pancasila yang memiliki kematangan intelektual, kreatif, percaya diri, inovatif, dan memiliki semangat pengabdian terhadap masyarakat, bangsa dan negara yang tinggi.
9) Fasilitasi bantuan hibah kepada Forum/Organisasi bentukan pemerintah dan Orkemas. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bidang Kemasyarakatan pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
10) Fasilitasi bantuan keuangan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Bekasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada Sub Bidang Fasilitiasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik;
11) Fasilitasi Hibah kepada Lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang, Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

12) Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bekasi. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 bahwa untuk mendukung kelancaran tugas Forkopimda Tim Sekretariat Forkopimda memberikan dukungan teknis administrasi dan teknis operasional, Badan Kesbangpol telah menyediakan anggaran dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas Forkopimda di Kota Bekasi;
13) Fasilitasi tim kewaspadaan deteksi dini daerah yang bertujuan untuk memantau perkembangan kantrantibmas dan kerawanan sosial-politik di masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen pada bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Selain itu, pelayanan Badan Kesbangpol kepada masyarakat juga dilakukan ke dalam bentuk pelaksanaan belanja urusan. Belanja urusan ini berupa pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tupoksi yang dilaksanakan pada Badan Kesbangpol. Pada Tahun 2026 belanja urusan Badan Kesbangpol sebagian besar belum mencapai target yang telah ditetapkan. Akan tetapi di dalam pelaksanaan terdapat beberapa kendala. Kendala yang dihadapi Badan dalam melaksanakan kegiatan urusan antara lain:

1) Masih adanya *misedlink* capaian yang digariskan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi terhadap capaian yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
2) Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kuantitas maupun kualitas, dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol;

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesbangpol Kota Bekasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Perubahan Rancangan RKPD Kota Bekasi Tahun 2026 telah sesuai mengakomodir kebutuhan Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2026.

Rencana program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kota Bekasi yang terdapat pada Perubahan RKPD Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2026

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rancangan RKPD Tahun 2026			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)			Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
8.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**13.213.744.000**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**11.797.051.683**	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai NSPK	2 Dokumen	75.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai NSPK	2 Dokumen	75.000.000	
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	50.000.000	
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	OPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	OPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	25.000.000	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai NSPK	2 Laporan	11.468.744.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai NSPK	2 Laporan	10.182.051.683	Efesiensi sebesar 571.989.000
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	OPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1316 Orang/bulan	11.453.744.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	OPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1020 Orang/bulan	10.167.051.683	Efesiensi sebesar 571.989.000
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	OPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	OPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	16 Laporan	15.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rancangan RKPD Tahun 2026			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)			Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Semesteran SKPD					Semesteran SKPD		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	1 Laporan	20.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	1 Laporan	20.000.000	
8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	OPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	20.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bekasi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	20.000.000	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	6 Laporan	875.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	6 Laporan	835.000.000	Terdapat efesiensi sebesar 40.000.000
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	OPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	350.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	OPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	350.000.000	
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	OPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	75.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	OPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	60.000.000	Terdapat efesiensi 15.000.000
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	OPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	50.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	OPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	50.000.000	
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	OPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	100.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	OPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	75.000.000	Terdapat efesinesi 25.000.000
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000	
8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	OPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	OPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	50.000.000	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerag yang Disediakan	1 Laporan	100.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerag yang Disediakan	1 Laporan	100.000.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rancangan RKPD Tahun 2026			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)			Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Urusan Pemerintah Daerah					Urusan Pemerintah Daerah					
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	OPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	100.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	OPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	100.000.000	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	3 Laporan	675.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	3 Laporan	585.000.000	Terdapat efesiensi sebesar 90.000.000
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	OPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	350.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	OPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	350.000.000	
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	OPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	75.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	OPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	75.000.000	
8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	250.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	160.000.000	Terdapat efesiensi sebesar 90.000.000
8.01.02	**Program Perguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**		**Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**100 %**	**1.885.499.300**	**Program Perguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**		**Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**100 %**	**1.385.499.300**	**Terdapat efesiensi sebesar 500.000.000**
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi		Jumlah Sub Kegiatan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	4 Sub Kegiatan	1.885.499.300	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi		Jumlah sub kegiatan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3 Sub Kegiatan	1.385.499.300	Terdapat efesiensi sebesar 500.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rancangan RKPD Tahun 2026			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)			Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Pancasila dan Karakter Kebangsaan					Pancasila dan Karakter Kebangsaan					
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200 Orang	50.000.000	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200 Orang	50.000.000	
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	90 Orang	500.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0 Orang	-	Terdapat efesiensi sebesar 500.000.000
8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Kota Bekasi	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	2 Dokumen	181.762.000	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Kota Bekasi	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	2 Dokumen	181.762.000	
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Kota Bekasi	Jumlah Paskibraka	52 Orang	1.153.737.300	Pembentukan Paskibraka	Kota Bekasi	Jumlah Paskibraka	52 Orang	1.153.737.300	
8.01.05	**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan**		**Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan**	**100 %**	**377.820.900**	**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan**		**Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan fasilitasi pencegahan**	**100%**	**219.889.900**	**Terdapat efesiensi sebesar**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rancangan RKPD Tahun 2026			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)			Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Ekonomi, Sosial dan Budaya		**narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah**			**Ekonomi, Sosial dan Budaya**		**penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah**			**157.931.000**
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		Jumlah Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	1 Sub Kegiatan	377.820.900	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		Jumlah Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	1 Sub Kegiatan	219.889.900	Terdapat efesiensi sebesar 157.931.000
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	400 Orang	377.820.900	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200 Orang	219.889.900	Terdapat efesiensi sebesar 157.931.000
8.01.06	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**		**Persentase konflik sosial yang diselesaikan**	**100 %**	**2.637.200.000**	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**		**Persentase konflik sosial yang diselesaikan**	**100 %**	**2.408.056.000**	**Terdapat efesiensi sebesar 229.144.000**
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan		Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3 Sub Kegiatan	2.637.200.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan		Jumlah sub kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	3 Sub Kegiatan	2.408.056.000	Terdapat efesiensi sebesar 229.144.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rancangan RKPD Tahun 2026			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)			Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Penanganan Konflik Sosial					Penanganan Konflik Sosial					
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	70 Orang	250.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2968 Orang	250.000.000	
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	537.200.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	537.200.000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rancangan RKPD Tahun 2026			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)			Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Penanganan Konflik di Daerah					Penanganan Konflik di Daerah					
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1.850.000.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1.620.856.000	Terdapat efesiensi sebesar 229.144.000
8.01.03	**Program Peningkatan Peran Partai Politik dab Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**		**Persentase pendidikan politik pada kader partai politik**	**100 %**	**10.287.880.000**	**Program Peningkatan Peran Partai Politik dab Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**		**Persentase pendidikan politik pada kader partai politik**	**100 %**	**10.257.484.000**	**Terdapat efesiensi sebesar 30.396.000**
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2 Sub Kegiatan	10.287.880.000	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2 Sub Kegiatan	10.257.484.000	Terdapat efesiensi sebesar 30.396.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rancangan RKPD Tahun 2026			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)			Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	11 Dokumen	9.937.880.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	11 Dokumen	9.937.880.000	
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1500 Orang	350.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1250 Orang	319.604.000	Terdapat efesiensi sebesar 30.396.000
8.01.04	**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi**		**Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif**	**71 %**	**5.850.000.000**	**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi**		**Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif**	**70%**	**4.439.904.987**	**Terdapat efesiensi sebesar 1.410.095.013**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rancangan RKPD Tahun 2026			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)			Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Kemasyarakatan					**Kemasyarakatan**					
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2 Sub Kegiatan	5.850.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Sub Kegiatan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Sub Kegiatan	4.439.904.987	Terdapat efesiensi sebesar 1.410.095.013
8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	5 Dokumen	5.750.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	5 Dokumen	4.439.904.987	Terdapat efisiensi sebesar 1.310.095.013
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	100.000.000	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0 Orang	-	Terdapat efisiensi sebesar 100.000.000
TOTAL					**34.252.144.200**					**30.507.885.870**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESBANGPOL KOTA BEKASI

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perubahan Renja Badan Kesbangpol Kota Bekasi TA. 2026 dikaitkan dengan misi yang tertulis dalam Renstra Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, yaitu “Memperkuat implementasi nilai nilai Ideologi Pancasila, stabilitas politik dalam negeri, persatuan dan kesatuan bangsa, serta kualitas demokrasi Indonesia”. Tujuan RPJMD Provinsi Jawa Barat juga menjadi acuan di dalam penyusunan perubahan Renja Badan Kesbangpol Kota Bekasi. Tujuan RPJMD Provinsi Jawa Barat yang menjadi acuan adalah “Meningkatkan kualitas demokrasi dan birokrasi yang didukung oleh inovasi daerah”. Penyusunan Perubahan Renja Badan Kesbangpol Kota Bekasi ini juga mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2026, yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan Kota Bekasi.

Tabel 3. 1 Tujuan dab Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2026

NO.	TUJUAN PERUBAHAN RKPD KOTA BEKASI TAHUN 2026	SASARAN PERUBAHAN RKPD KOTA BEKASI TAHUN 2026
1.	Tujuan 4: Terwujudnya iklim investasi Kota Bekasi yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat

3.2 Tujuan dan Sasaran Badan Kesbangpol Kota Bekasi

Untuk mendukung pelaksanaan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 dan didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Kota Bekasi yang dikaitkan dengan sasaran dan Target Kinerja Renstra Badan Kesbangpol Kota Bekasi, maka perubahan tujuan dan sasaran Renja Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan 1	:	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
Indikator Tujuan 1	:	Indeks Harmoni
Sasaran 1	:	Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM di Kota Bekasi
Indikator Sasaran 1	:	Inklusi Sosial
Sasaran 2	:	Meningkatnya kewaspadaan dan kesadaran masyarakat dalam mendukung kehidupan harmoni di daerah
Indikator Sasaran 2	:	Persentase konflik sosial daerah yang diselesaikan

Berikut target kinerja Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2026:

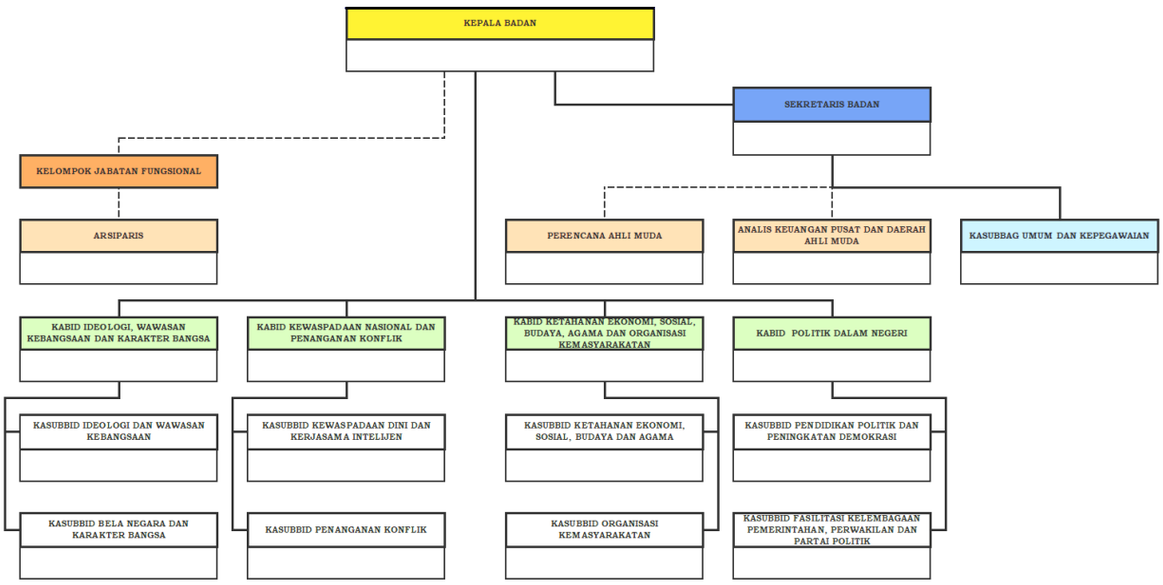
Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2026
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM di Kota Bekasi	Inklusi Sosial	7,65
	Meningkatnya kewaspadaan dan	Persentase konflik sosial darerah yang	100 %

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2026
	kesadaran masyarakat dalam mendukung kehidupan harmoni di daerah	diselesaikan	

Struktur Organisasi Badan Kesbangpol Kota Bekasi sebagai Pihak Ketercapaian Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 129 Tahun 2021 sebagai berikut :

Gambar 3. 1 Struktur Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi
(*Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 129 Tahun 2021*)



Sumber daya Badan Kesbangpol Kota Bekasi terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Anggaran dan Sumber Daya Aset. SDM merupakan faktor sentral dan strategis dalam suatu organisasi. Dalam suatu organisasi, SDM merupakan penggerak utama dari organisasi tersebut. Berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan Tahun 2023, Badan Kesbangpol Kota Bekasi memiliki jumlah pegawai sebanyak 46 orang, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi menurut Esselonoring (Data juni 2026)

NO	Esselon	A		B		Jumlah	Ket
		L	P	L	P		
1	II	-	-	1	-	1	
2	III	-	1	1	1	3	
3	IV	6	2	-	-	8	
	Pangkat	**ASN**		**TKK**			
1	Jafung	-	3	-	-	3	
2	Staff	19	11	-	-	30	
Jumlah Total Esselon						**45**	

3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kesbangpol Kota Bekasi Pada Perubahan Anggara TA. 2026

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja di Tahun anggaran 2025 melaksanakan 6 (Enam) Program, 11 (sebelas) Kegiatan, dan 26 (dua puluh enam) Sub Kegiatan. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Hasil Perubahan dijelaskan pada Tabel Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 sesuai dengan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang di Rinci menurut Sumber Pendanaan bersumber dari APBD Kota Bekasi. Secara rinci berikut adalah perubahan program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2026 serta prakiraan maju Tahun 2027:

Tabel 3. 3 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesbangpol Kota BekasiTahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Renja Tahun 2026 Sebelum dan Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang Pagu (Rp)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target	
Bidang Urusan Pemerintahan Umum												
8.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kualitas layanan penunjang urusan pemerintah daerah**		**100%**	**100%**	**13.213.744.000**	**11.797.051.683**		**-(1.416.692.317)**	**Persentase kualitas layanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**12.392.385.000**
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai NSPK		2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000	75.000.000		0	Jumlah Dokumen Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	2 Dokumen	76.500.000
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	PAD	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	52.020.000
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	OPD	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	25.000.000	PAD	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	26.010.000
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai NSPK		2 Laporan	2 Laporan	11.468.744.000	10.182.051.683		-(571.989.000))	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	2 Laporan	11.732.081.258
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OPD	1316 Orang/bulan	1316 Orang/bulan	11.453.744.000	10.167.051.683	PAD, DAU	-(1.286.692.312)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1316 Orang/bulan	11.717.081.258
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	OPD	16 Laporan	16 Laporan	15.000.000	15.000.000	PAD	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	15.000.000
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	20.000.000		-	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	1 Laporan	20.400.000
8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	OPD	10 Orang	10 Orang	20.000.000	20.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	20.400.000

Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Renja Tahun 2026 Sebelum dan Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang Pagu (Rp)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target	
								Sebelumnya				
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK		6 Laporan	6 Laporan	875.000.000	835.000.000		-(40.000.000)	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	6 Laporan	892.500.000
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	OPD	3 Paket	3 Paket	350.000.000	350.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	357.000.000
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	OPD	12 Paket	12 Paket	75.000.000	60.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-(15.000.000)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	76.500.000
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	OPD	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000	50.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	51.000.000
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	OPD	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	75.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	102.000.000
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	OPD	12 Laporan	12 Laporan	250.000.000	250.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	255.000.000
8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	OPD	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000	50.000.000	PAD	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	51.000.000
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah yang disediakan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	100.000.000		-	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	1 Laporan	202.000.000
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	OPD	7 Unit	11 Unit	100.000.000	100.000.000	DAU	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit	202.000.000
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara		3 Laporan	3 Laporan	675.000.000	585.000.000		-(90.000.000)	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	3 Laporan	888.500.000
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	OPD	22 Unit	22 Unit	350.000.000	350.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	357.000.000

Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Renja Tahun 2026 Sebelum dan Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang Pagu (Rp)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target	
	atau Kendaraan Dinas Jabatan	dan dibayarkan Pajaknya						Sebelumnya				
8.01.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	OPD	25 Unit	25 Unit	75.000.000	75.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	76.500.000
8.01.01.2.09.00 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	OPD	1 Unit	1 Unit	250.000.000	160.000.000	DAU	-(90.000.000)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	455.000.000
8.01.02	**Program Perguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan**		**100 %**	**100 %**	**1.885.499.300**	**1.385.499.300**		**-(500.000.000)**	**Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan**	**100 %**	**1.285.938.892**
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah sub kegiatan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan		4 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	1.885.499.300	1.385.499.300		-(500.000.000)	Jumlah sub kegiatan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3 Sub Kegiatan	1.285.938.392
8.01.02.2.01.00 03	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Bekasi	200 Orang	200 Orang	50.000.000	50.000.000	PAD	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	350 Orang	21.538.000
8.01.02.2.01.00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Bekasi	90 Orang	0 Orang	500.000.000	-	DBH	-(500.000.000)	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300 Orang	50.900.000
8.01.02.2.01.00 07	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Kota Bekasi	2 Dokumen	2 Dokumen	181.762.000	181.762.000	PAD	-	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	-	-
8.01.02.2.01.00 08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Kota Bekasi	52 Orang	52 Orang	1.153.737.300	1.153.737.300	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	-	Jumlah Paskibraka	52 Orang	1.213.500.892

Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Renja Tahun 2026 Sebelum dan Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang Pagu (Rp)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target	
								Sebelumnya				
8.01.05	**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan**		**100 %**	**100 %**	**377.820.900**	**219.889.900**		**-(157.931.000)**	**Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan**	**100 %**	**610.689.503**
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah sub kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	377.820.900	219.889.900		-(157.931.000)	Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	1 Sub Kegiatan	610.689.503
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Bekasi	400 Orang	200 Orang	377.820.900	219.889.900	PAD	-(157.981.000)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2.800 Orang	610.689.503
8.01.06	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase konflik social yang diselesaikan**		**100 %**	**100 %**	**2.637.200.000**	**2.408.056.000**		**-(229.144.000)**	**Persentase konflik sosial yang diselesaikan**	**100 %**	**2.119.217.400**
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	2.637.200.000	2.408.056.000		-(229.144.000)	Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3 Sub Kegiatan	2.119.217.400
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga	Kota Bekasi	70 Orang	2968 Orang	250.000.000	250.000.000	PAD	-	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	70 Orang	114.737.400

Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Renja Tahun 2026 Sebelum dan Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang Pagu (Rp)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target	
	Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
8.01.06.2.01.00 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Bekasi	12 Laporan	12 Laporan	537.200.000	537.200.000	PAD	-	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	564.480.000
8.01.06.2.01.00 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	12 Dokumen	12 Dokumen	1.850.000.000	1.620.856.000	SILPA	- (229.144.000)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1.440.000.000
8.01.03	**Program Peningkatan Peran Partai Politik dab Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**	**Persentase pendidikan politik pada kader partai politik**		**100 %**	**100 %**	**10.287.880.000**	**10.257.484.000**		**-(30.396.000)**	**Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik**	**100 %**	**9.916.098.400**
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	10.287.880.000	10.257.484.000		-(30.396.000)	Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2 Sub Kegiatan	9.916.098.400
8.01.03.2.01.00 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang	Kota Bekasi	11 Dokumen	11 Dokumen	9.937.880.000	9.937.880.000	PAD	-	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang	11 Dokumen	9.687.880.000

Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Renja Tahun 2026 Sebelum dan Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang Pagu (Rp)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target	
	Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun									Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun		
8.01.03.2.01.00 04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Bekasi	1500 Orang	1250 Orang	350.000.000	319.604.000	PAD	-(30.396.000)	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.250 Orang	228.218.400
8.01.04	**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif**		**71 %**	**71%**	**5.850.000.000**	**4.439.904.987**		**-(1.410.095.013)**	**Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif**	**71 %**	**2.883.283.058**
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Sub Kegiatan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		2 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	5.850.000.000	4.439.904.987		-(1.410.095.013)	Jumlah sub kegiatan Program Kerja du Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Sub Kegiatan	2.883.283.058
8.01.04.2.01.00 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Kota Bekasi	5 Dokumen	5 Dokumen	5.750.000.000	4.439.904.987	Sisa Lebih Hasil Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-(1.310.095.013)	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	5 Dokumen	2.778.103.058
8.01.04.2.01.00 03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas,	Kota Bekasi	100 Orang	0 Orang	100.000.000	-	DBH	-(100.000.000)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas,	300 Orang	105.180.000

Kode Rek	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Renja Tahun 2026 Sebelum dan Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang Pagu (Rp)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target	
	Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
TOTAL						**34.252.144.200**	**30.507.885.870**		**-(3.744.258.330)**			**29.207.612.253**

Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi satu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Penyusunan Renja-PD berpedoman pada Renstra Badan Kesbangpol Kota Bekasi dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Semua program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan oleh Badan Kesbangpol Kota Bekasi telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kesesuaian ini sangat penting karena memastikan bahwa setiap upaya yang dilakukan tidak hanya mendukung visi dan misi kepala daerah, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas. Dengan kata lain, setiap langkah yang diambil oleh Badan Kesbangpol harus terintegrasi dengan rencana strategis yang lebih besar, sehingga menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Bekasi. Setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan dianggarkan secara terperinci. Proses penganggaran yang cermat ini bertujuan untuk menjamin bahwa sumber daya yang tersedia dialokasikan dengan efisien dan efektif. Anggaran yang disusun mencerminkan prioritas dan kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelolaan anggaran yang baik akan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat.

Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Badan Kesbangpol adalah urusan Pemerintahan Umum, yang merupakan urusan wajib. Kebersinambungan Rencana Kerja Kesbangpol dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilihat yaitu dengan adanya Prioritas Pembangunan yang dilaksanakan pada program-program Badan Kesbangpol.

Program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol dan dokumen pembangunan lainnya. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang

akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun yang dimaksud dengan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Dalam komponen kegiatan ini, perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

Program dan Kegiatan dalam periode tahunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol merupakan kegiatan yang menjadi wewenang Badan Kesbangpol dalam rangka mendukung terwujudnya Misi Kota Bekasi melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 dibagi berdasarkan 2 (dua) bagian besar, yaitu Program Prioritas dan Program Rutin (Program yang ada dihampir seluruh Organiasi Perangkat Daerah).

Program Prioritas Badan Kesbangpol adalah :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;
6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

BAB IV
PENUTUP

A. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja Perubahan

Penetapan program dan kegiatan yang ada di dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam melakukan perumusan Renja, kebijakan yang tertuang di dalam RPJMD Kota Bekasi dan Renstra Badan Kesbangpol Kota Bekasi dijadikan rujukan utama di dalam proses penyusunan. Prinsip yang digunakan dalam penyusunan Renja ini adalah prinsip efesiensi, efektivitas, transparan dan akuntabel.

Inti dari penyusunan Renja Perubahan ini adalah optimalisasi pencapaian hasil dari upaya Perangkat Daerah per tahun anggaran. Selain itu, Renja Peruabahan mempunyai posisi penting di dalam menciptakan keterpaduan dan sinkronasi antar kegiatan yang ada di dalam satu program, maupun kegiatan-kegiatan yang berlainan program. Oleh karenanya, untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronasi di dalam pelaksanaan program/kegaiatan yang telah direncanakan, diperlukan *sharing* informasi dari Program/Kegaiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah. Melalui penyusunan Renja lah *sharing* informasi itu dapat dilaksanakan.

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada tahun berjalan terdapat kendala, baik dalam proses pelaksanaan fisik dan anggaran, maka akan dilakukan penyesuain dokumen perencanaan kerja. Penyesuaian tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Perubahan yang terlebih dahulu dilakukan proses keselarasan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan.

B. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Akhir Badan Kesbangpol merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dilaksanakan selama tahun 2026. Untuk menyusun Renja Badan Kesbangpol Kota Bekasi ini setiap tahapan perencanaan pelaksanaan pembangunan telah dilaksanakan. Dimulai dari penjaringan usulan yang berasal dari Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan hingga Forum Musrenbang Tingkat Kota Bekasi. Pada setiap tahapan perencanaan yang dijalani, memungkinkan terjadinya kesalahan maupun distorsi maksud atau tujuan dari usulan.

Oleh karena itu, apabila terjadi perubahan kebijakan daerah maupun kebijakan nasional selama tahun 2026, Badan Kesbangpol Kota Bekasi akan melakukan perubahan-perubahan demi kesempurnaan Renja ini.

C. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu meningkatkan pemahaman dan penguatan fungsi deteksi dini dari setiap aparatur Badan Kesbangpol. Hal ini diperlukan untuk melakukan analisa kerawanan sosial yang terjadi di masyarakat, baik itu tahapan preventif maupun rehabilitasi;
2. Perlu meningkatkan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan rasa solidaritas dan tenggang rasa di masyarakat Kota Bekasi;
3. Aparatur Badan Kesbangpol yang ada saat ini dari sisi kualitas masih kurang, sehingga akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan penambahan jumlah pegawai;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat di dalam proses pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bekasi, 26 Agustus 2026

Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Bekasi



Drs. Hudi Wijayanto, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19690121 199007 1 001

USULAN RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI

TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JENIS BELANJA	PAGU INDIKATIF RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026 (MURNI)	PAGU INDIKATIF RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026 (PERUBAHAN)
1	**BELANJA LANGSUNG PENUJANG URUSAN (BLPU)**	**RP. 13.213.744.000,-**	**RP. 11.797.051.683,-**
2	**BELANJA LANGSUNG URUSAN (BLU)**	**RP. 5.350.520.200,-**	**RP. 4.333.049.200,-**
3	**BELANJA HIBAH (HIBAH BANTUAN PARTAI POLITIK, HIBAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN HIBAH FASILITASI LEMBAGA PEMERINTAH)**	**RP. 15.687.880.000,-**	**RP. 14.377.784.987,-**
TOTAL KESELURUHAN		**Rp. 34.252.144.200,-**	**RP. 30.507.885.870,-**

Catatan :

Berdasarkan hasil pemetaan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029, Badan Kesbangpol untuk tahun Anggaran 2026 termuat pagu anggaran berjumlah Rp. **34.252.144.200,-** akan tetapi setelah adanya beberapa kegiatan hasil penyesuaian kebijakan, setelah hasil desk rancangan awal pada pagu anggaran berubah (Pagu Murni) menjadi Rp. **32.304.509.187,-**. dan pada Renja Perubahan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 setelah dilakukan pemyesuaian pagu anggaran berubah menjadi **Rp. 30.507.885.870,-**